KOTA PASURUAN

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN BUGUL KIDUL



TAHUN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatdan karunia Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025. Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kota Pasuruan harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik.

Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kota Pasuruan melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan selama tahun 2025. Diharapkan LKjIP Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan dalam periode tahun 2021-2026.

LKjIP tahun 2025 ini telah berpedoman pada Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Pasuruan.

Pasuruan, 29 Februari 2026

CAMAT BUGUL KIDUL

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP.19851029 200412 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ikhtisar Eksekutif merupakan Uraian Capaian Program dan Kegiatan Urusan-unsur Kewilayahan.

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum memiliki satu indikator kinerja, yaitu persentase penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Pada tahun 2025, indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil capaian, realisasi yang diperoleh juga mencapai 100 persen sehingga target kinerja dapat terpenuhi sepenuhnya.

Indikator Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat memiliki definsi operasional Membandingkan antara Jumlah jenis layanan yang diberikan dengan total layanan pada SK Layanan. Pelayanan yang ada di Kecamatan Bugul Kidul diantaranya Pembayaran PBB, Kepengurusan Surat Ahli Waris, IMB, Dispensasi Nikah, dan Surat Keterangan Lainnya. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum didukung oleh satu kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 4 kegiatan dan terealisasi 4 Kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%. Kegiatan tersebut adalah Kecamatan dalam Angka, Lomba Kelurahan cepat Berkembang, Penyusunan buku Monografi, dan Register layanan di Kecamatan. Capaian ini berdasarkan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah dilaksanakan. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh urusan administrasi masyarakat dalam urusan pemerintahan yang telah dilayani oleh Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Bugul Kidul.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki satu indikator kinerja, yaitu persentase penanganan pengaduan trantibmas dan kebencanaan. Pada tahun 2025, indikator tersebut ditetapkan dengan target capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi program mencapai 100 persen sehingga seluruh target kinerja terpenuhi.

Indikator Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan memiliki definisi operasional yakni Membandingkan antara Jumlah Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan yang ditangani dengan jumlah total pengaduan tratibmas dan kebencanaan yang masuk ke Kecamatan dan Kelurahan. Pengaduan yang masuk yaitu 30 pengaduan Pengaduan yang ditangani yaitu 30 pengaduan di Wilayah Kecamatan Bugul Kidul, meliputi: Kecelakaan lalu lintas, pencurian, kebakaran lahan, Tabrakan Kereta Api, Kenakalan Remaja, Penganiayaan, sengketa lahan, banjir dan kasus serupa yang ditangani secara tepat waktu.

Ketercapaian target indikator ini didukung oleh koordinasi dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal terkait dalam menangani pengaduan masyarakat. Selain itu, pihak Kecamatan juga proaktif dalam menindaklanjuti pengaduan dengan melakukan koordinasi dan siaga bencana alam secara tepat sasaran.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban didukung oleh satu kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 4

kegiatan dan terealisasi sejumlah 4 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, yakni Pemberian Bantuan Bencana Alam, patroli wilayah, pembinaan Kamtibmas Kecamatan, Rapat Ketentraman dan ketertiban Masyarakat. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh peran serta aktif dari sinergitas dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan dalam mensosialisasikan fungsi kecamatan dan kelurahan sebagai sarana pengaduan yang terdekat dengan masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pelaksanaan program ketiga, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, diukur melalui satu indikator berupa persentase kelembagaan masyarakat yang dibina. Pada tahun 2025, indikator tersebut ditetapkan dengan target sebesar 100 persen. Realisasi capaian juga mencapai 100 persen, sehingga tingkat pencapaian program tercatat sebesar 100,00 persen.

Indikator persentase kelembagaan masyarakat yang dibina memiliki definisi operasional, yaitu Membandingkan antara Kelembagaan masyarakat yang di bina yang anggarannnya masuk dalam Daftar Perencanaan Anggaran di kecamatan dengan jumlah total Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan. Lembaga tersebut diantaranya PKK, Layak Anak, UKS, Kecamatan Sehat, Qori', Kelembagaan Praktis, dan Dasawisma.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan satu indikator yaitu Jumlah Kegiatan atau aksi yang dilaksanakan di Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 7 kegiatan dengan realisasi sejumlah 7 kegiatan atau terealisasi sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan pada jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa oleh Kecamatan Bugul Kidul yakni PKK, Kecamatan Sehat. Layak Anak, UKS, Qori', Stunting, dan Kelembagaan Praktis, dan Evaluasi Dana Kelurahan.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diukur dengan indikator Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang terlaksana, pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah 7 kegiatan dan terlaksana sejumlah 7 kegiatan, sehingga capaiannya adalah 7 kegiatan. Capaian ini berdasarkan pada jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Bugul Kidul. Ketercapaian target indikator ini didukung oleh kemampuan Lurah dalam merencanakan target kinerja dengan baik dan melaksanakannya dengan tepat dan baik.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan satu indikator yaitu: Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot. Memiliki definisi operasional Jumlah usulan musrembangcam yang diakomodir dalam musrembangkot dibagi dengan jumlah usulan musrembangcam. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 87% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Capaian ini berdasarkan

data usulan masyarakat yang diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Usulan yang diakomodir pada tahun 2025 sejumlah 47 usulan dari total usulan masyarakat sejumlah 47 usulan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung oleh satu Kegiatan yakni:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diukur dengan indikator Jumlah usulan dalam Musrebangcam dengan target sebesar 43 usulan dan terealisasi sebesar 43 usulan sehingga diperoleh presentasenya sebesar 100%. Jumlah usulan musrenbang tingkat kecamatan yang masuk dalam prioritas yang tercapai sejumlah 43 usulan dari total target usulan musrenbang tingkat kecamatan sejumlah 43 usulan. Ketercapaian indikator ini dikarenakan semua usulan masuk kedalam usulan prioritas musrenbangkot.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

IKHTISAR EKSEKUTIF .....

DAFTAR ISI .....

DAFTAR TABEL.....

DAFTAR GAMBAR .....

BAB I .....

PENDAHULUAN…….....

1.1 Latar Belakang .....

1.2 Penjelasan Umum Organisasi .....

1.2.1 Isu Strategis .....

1.2.2 Peta proses Bisnis .....

1.2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....

1.2.4 Dukungan SDM .....

1.2.5 Sarana Prasarana .....

1.2.6 Anggaran .....

1.3 Dasar Hukum .....

1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 .....

1.6 Langkah Perbaikan Internal PD atas Rekomendasi LKJIP 2023 .....

BAB II ……..…….

PERENCANAAN KINERJA …….....

2.1 Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Lima Tahun Terakhir Perangkat Daerah .....

2.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....

2.2 Rencana Kinerja Tahun n .....

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....

2.4 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....

BAB III .....

AKUNTABILITAS KINERJA .....

3.1 Capaian Kinerja .....
3.1.1 Skala Capaian Kinerja .....
3.1.2 Membandingkan antara terget dan realisasi tahun pelaporan.....
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir .....
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) .....
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan .....
3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....
3.1.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....
3.2 Realisasi Anggaran .....
3.3 Inovasi .....
3.4 Penghargaan .....

BAB IV .....
4.1 Kesimpulan .....
4.2 Rekomendasi .....

PENUTUP .....
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2023) dan Tahun n (2025)Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul KIdul Kota Pasuruan Tahun 2025

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Bugul Kota Pasuruan Tahun 2025

Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota PasuruanTahun 2025

Tabel 3.1 Pengkatagorian Capaian Kinerja

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025Perbandingan

Tabel 3.3 Capaian Kinerja

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran strategis

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan SasaranAnalisis

Tabel 3.8 Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kota Pasur

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Kecamatan Bugul Kidul menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

LKJiP tahun 2025 telah berpedoman pada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Bugul Kidul) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Bugul Kidul dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bugul

Kidul;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Bugul Kidul pada tahun berikutnya.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Wali kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, tugas kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Wali Kota;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Kelurahan;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Yang Ada DiKecamatan;
i. Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Wali Kota Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
j. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan/Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Kelurahan; Dan
k. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Wali Kota Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

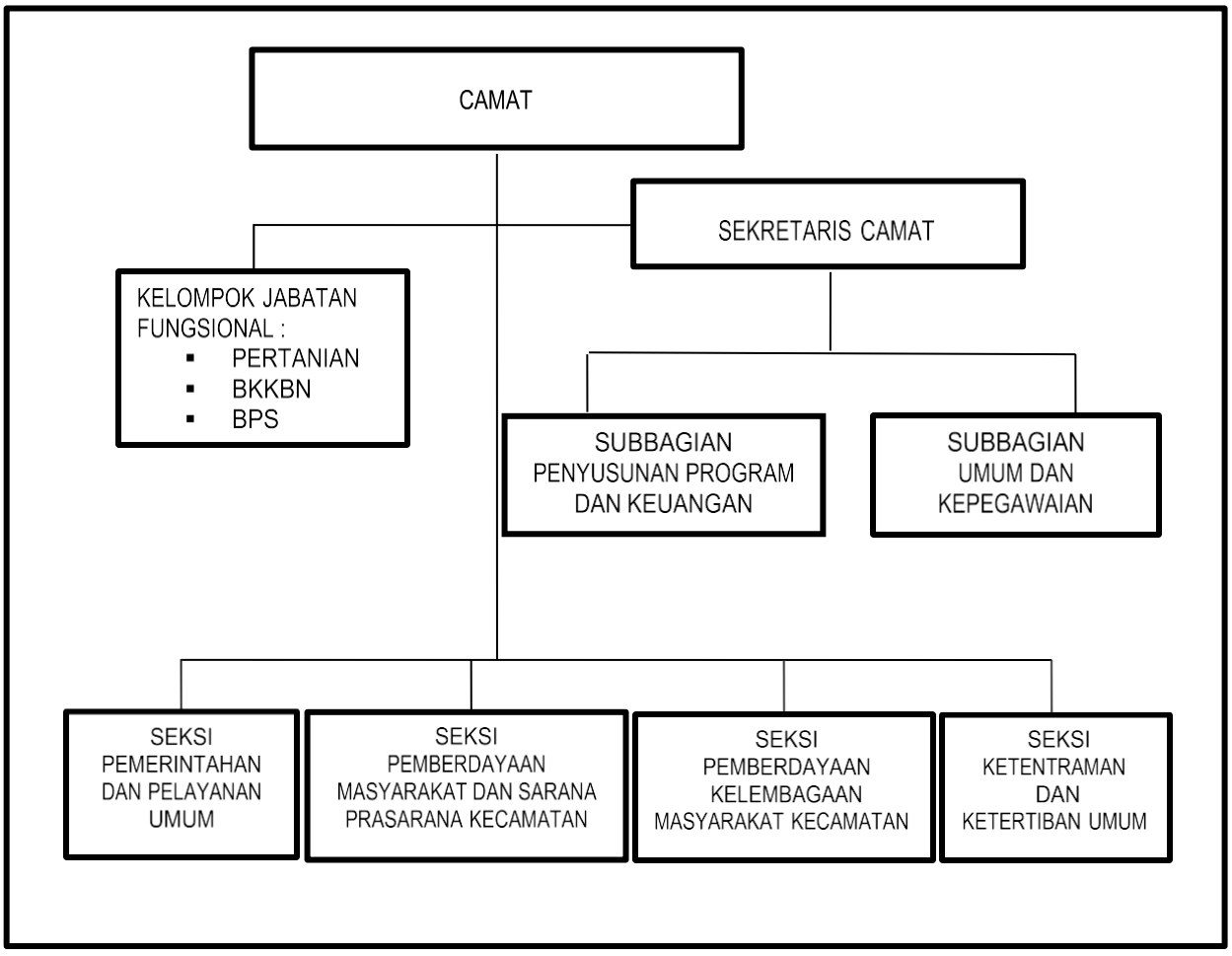
1.2.2 Dukungan SDM

Untuk Melaksanakan Tugasnya, Kecamatan Bugul Kidul memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian, Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan;
b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Di Wilayah Kecamatan;
c. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan Kecamatan;
d. Dan Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan.

Berikut Ini Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Bugul Kota Pasuruan



Sumber: Lampiran Peraturan Walikota (PERWALI) No 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kepegawaian dan Struktur Organisasi

Dalam mendukung kegiatannya dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bugul Kidul kota Pasuruan per 31 Desember 2025 mempunyai personil sebanyak 47 personil PNS (Pegawai Negeri Sipil), 2 personil PPPK, 28 Personil PPPK Paruh Waktu di Kecamatan Bugul Kidul, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pangkat/Golongan	JUMLAH
1	Juru Tk (I/d)	0
2	Pengatur Muda (II/a)	1
3	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	3
4	Pengatur (II/c)	7
5	Pengatur Tk. I (II/d)	5
6	Penata Muda (III/a)	7
7	Penata Muda Tk. I (III/b)	5
8	Penata (III/c)	6
9	Penata Tk. I (III/d)	9
10	Pembina (IV/a)	4
No	**LULUSAN**	**JUMLAH**
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	24
4	S1	4
5	S2	0

Susunan Organisasi Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan
2. Sekertariat membawahi :
   a. Subbag. Penyusunan Program dan Keuangan
   b. Subbag. Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana dan Prasarana
6. Seksi pemberdayaan kelembagaan Masyarakat

Susunan Organisasi Kelurahan dilingkungan Kec Bugul Kidul Kota Pasuruan yang terdiri atas 6 (Enam) kelurahan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
4. Seksi Pemerintahan,Ketentraman ,Ketertiban dan Pelayanan Umum
5. Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana

Rincian 6 (Enam) Kelurahan sebagai berikut :

NO	KELURAHAN
1.	Bugul Kidul
2.	Krampyangan
3.	Blandongan
4.	Tapa'an
5.	Kepel
6.	Bakalan

1.2.4 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Bugul Kidul adalah salah satu Kecamatan yang secara administratif berada diwilayah Kota Pasuruan dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo
- Sebelah Timur : Desa Sambirejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan
- Sebelah Barat : Kecamatan Panggungrejo

Daftar Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bugul Kidul

NO	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah
1	CCTV	8
2	LEMARI BESI	2
3	KURSI RAPAT	125
4	MEJA KERJA	28
5	KOMPUTER ACER	2
6	PRINTER EPSON	2
7	SCANNER	1

1.2.5 Anggaran

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 (2024) dan Tahun n (2025)

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2024	12.025.857.313
APBD	2025	11.788.309.053

Sumber: Dokumen Pelaksana Anggaran Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Kecamatan Bugul Kidul, memiliki lima (5) program, Dua Belas (12) kegiatan dan Lima Puluh Delapan (58) sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 12.025.857.313,- dan sampai dengan Tribulan IV Tahun 2025, realisasi keuangan telah mencapai Rp. 12.025.857.313. Berikut adalah pagu anggaran masing-masing program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pagu anggaran sebesar 9.240.211.433
2. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik pagu anggaran sebesar 36.000.000
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan pagu anggaran sebesar 1.736.703.080
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum pagu anggaran sebesar 406.319.100
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pagu anggaran sebesar 711.499.700

1.3 Dasar Hukum

Laporan kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota (PERWALI) No 3 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
11. RPJMD Periode 2025-2029

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Kecamatan Bugul Kidul dan Sistematika Penyajian.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

i. Perjanjian Kinerja
ii. Lain-lain yang dianggap perlu

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

RENCANA AKSI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
	Memaksimalkan atas capaian kinerja yang masih belum memenuhi target dengan penuh perhatian	Kecamatan Bugul Kidul akan memaksimalkan capaian kinerja yang masih belum memenuhi target melalui pemantauan, evaluasi, serta pemberian perhatian khusus pada program dan kegiatan prioritas.	12 bulan	Januari-Desember	Sudah dilaksanakan
	Menyampaikan dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan melalui website tepat waktu sesuai ketentuan	Kecamatan Bugul Kidul akan menyampaikan dan memublikasikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) melalui website resmi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12 bulan	Januari-Desember	Sudah dilaksanakan
	Mengunggah SKP tiap pegawai dan melakukan evaluasi internal terkait pembahasan capaian kinerjanya dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungannya	Kecamatan Bugul Kidul akan mengunggah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh pegawai serta melaksanakan evaluasi internal dengan melibatkan seluruh pegawai dalam pembahasan capaian dan perbaikan kinerja.	1 kegiatan	Januari-Desember	Sudah dilaksanakan

	Melakukan evaluasi mandiri atas implementasi SAKIPnya setiap tahunnya yang menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas dan sampean kinerja	Kecamatan Bugul Kidul akan melakukan evaluasi mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap tahun untuk menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas dan capaian kinerja.	12 bulan	Januari-Desember	Belum dilaksanakan

1.6 Langkah Perbaikan Internal Perangkat daerah atas Rekomendasi LKJIP 2024

Tidak terdapat rekomendasi atas LKjIP Tahun 2024 yang diberikan oleh Inspektorat. Meskipun demikian, penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja secara internal tetap perlu terus ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan ke depan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

2.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2025 - 2029 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun periode tahun 2025-2029, yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Pasuruan sesuai misi yang diemban. RPJMD Kota Pasuruan periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yaitu Pemantapan Landasan Pembangunan, Pada tahapan periode pertama RPJPD Kota Pasuruan (2025-2029), terdapat fokus yang ditekankan untuk memantapkan landasan pondasi pembangunan. Rincian fokus pada periode ini mencakup pemenuhan layanan dasar, penguatan modal sosial, pembangunan infrastruktur penunjang dan dasar yang merata, serta penataan regulasi dan kebutuhan dasar kelembagaan, termasuk transformasi tata kelola pemerintah. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2025 - 2029 yaitu:

PASURUAN ANUGRAH

“Aktif Pelayanan Publiknya, Mandiri Ekonominya, Guyub Warganya dan Indah Kotanya”

Pelayanan publik yang aktif diwujudkan melalui pendekatan yang responsif, efisien, dengan akses yang mudah dan kecepatan dalam prosesnya. Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menghadirkan layanan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan pengguna layanan. Responsivitas diwujudkan dalam bentuk keterbukaan terhadap aspirasi, keluhan, maupun permintaan masyarakat, yang langsung ditindaklanjuti melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Setiap pengaduan atau permohonan yang masuk dikelola secara profesional dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Efisiensi dicapai melalui penyederhanaan prosedur,

pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hal ini memungkinkan pelayanan dilakukan tanpa birokrasi yang berbelit-belit, namun tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Masyarakat juga diberikan kemudahan akses terhadap layanan, baik secara langsung di loket pelayanan, melalui aplikasi daring, maupun melalui layanan mobile yang menjangkau semua wilayah. Kemudahan ini memastikan tidak ada hambatan dalam mendapatkan pelayanan, kapanpun dan dimanapun masyarakat membutuhkan. Dengan perpaduan kecepatan dalam respon, efektivitas proses, kemudahan akses, serta penggunaan teknologi yang tepat, pelayanan publik diarahkan menjadi lebih modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

"Pemerintah Kota Pasuruan bertekad mewujudkan pelayanan publik yang aktif, responsif, dan efisien melalui inovasi berbasis teknologi. Dengan program AKTIF PELAYANAN PUBLIKNYA, setiap layanan dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat, mudah diakses, dan bebas birokrasi berbelit. Salah satu terobosan utamanya adalah pendekatan prinsip SELESAI (Semua Efisien, Lengkap, dengan Satu Aplikasi Terintegrasi), yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan berbagai keperluan administratif dalam satu platform digital—cepat, transparan, dan akuntabel. Dukungan sistem BOS AKTIF (Birokrasi yang Responsif, Akuntabel, dan Efektif) memperkuat komitmen Kota Pasuruan dalam memberikan layanan prima berstandar tinggi, memastikan kepuasan masyarakat melalui prosedur yang sederhana, SDM yang profesional, serta kemudahan akses baik secara luring maupun daring. Dengan pendekatan ini, pelayanan publik Kota Pasuruan siap menjadi contoh layanan modern, inklusif, dan berorientasi pada rakyat.

Mandiri ekonominya diwujudkan dengan terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi terpadu yang mencakup perluasan lapangan kerja, pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil, serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Upaya perluasan lapangan kerja dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong masuknya sektor-sektor produktif, serta memberikan pelatihan dan pendampingan tenaga kerja agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan demikian, peluang kerja terus bertambah dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara signifikan. Sejalan dengan itu, Usaha Mikro dan Kecil sebagai tulang punggung ekonomi rakyat terus didorong tumbuh dan berkembang. Pemerintah

Kota Pasuruan memberikan berbagai bentuk dukungan, mulai dari penyederhanaan perizinan, peningkatan akses pasar, pelatihan manajemen usaha, hingga fasilitasi promosi produk lokal. Di sisi lain, BUMD dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Melalui revitalisasi tata kelola, penguatan modal, dan diversifikasi usaha, BUMD diarahkan untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mampu mendukung kebutuhan strategis daerah, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan fokus pada program Perluasan Lapangan Kerja, Pertumbuhan UMKM, dan Optimalisasi BUMD, kami mendorong terciptanya kesempatan kerja yang inklusif serta pemberdayaan pelaku usaha kecil. Melalui PRIMA (Pengembangan Rantai Investasi Mikro dan Angkatan Kerja), akses modal dan pelatihan keterampilan terfasilitasi agar tenaga kerja dapat bersaing di pasar yang dinamis. Dukungan terhadap ekonomi kreatif diwujudkan lewat INSPIRE (Inovasi dan Skill Perkuat Industri Rekreasi dan Ekonomi Kreatif), yang mendorong kreativitas dan inovasi sebagai penggerak ekonomi baru. Selain itu, program KERAP (Kesempatan Ekonomi Rakyat Produktif) memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM, mendapatkan kemudahan berinvestasi, perluasan pasar, serta pendampingan usaha. Di sisi lain, BUMD diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi daerah melalui tata kelola yang profesional dan diversifikasi usaha, sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan strategi terpadu ini, Kota Pasuruan siap menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, berbasis potensi lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan Masyarakat

Guyub warganya, mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli menjadi fondasi utama dalam memperkuat kohesi sosial dan ketahanan sosial budaya di daerah. Nilai- nilai kegotongroyongan dan solidaritas warga terus dipelihara dan diwujudkan melalui komunitas-komunitas yang aktif, terhubung, dan inklusif, baik dalam bidang sosial, lingkungan, kreatif, keagamaan, maupun pemberdayaan ekonomi. Komunitas-komunitas ini tidak hanya menjadi ruang ekspresi dan kolaborasi, tetapi juga menjadi jembatan penghubung antara warga dengan pemerintah, antara generasi tua dan muda, serta antara pelaku budaya dan masyarakat luas. Di sisi lain, pembangunan kepemudaan menjadi salah satu pilar

strategis dalam menyiapkan generasi penerus yang kreatif, berdaya saing, dan berjiwa kepemimpinan. Pemerintah Kota Pasuruan mendorong partisipasi pemuda melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan organisasi kepemudaan, serta dukungan terhadap kegiatan positif yang menumbuhkan semangat inovasi, nasionalisme, dan kolaborasi lintas sektor. Pelestarian seni tradisi, revitalisasi ruang budaya, dan penguatan pelaku seni menjadi bagian dari upaya membangun peradaban yang berakar pada kearifan lokal namun terbuka terhadap perkembangan zaman. Keguyuban warga tidak hanya tercermin dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun akses yang merata dan kualitas yang baik di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua. Di bidang pendidikan, masyarakat bersama Pemerintah Kota Pasuruan membangun semangat gotong royong dalam mendukung akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembangunan sekolah dan penyediaan sarana belajar, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan aktif orang tua, komunitas belajar, serta gerakan literasi yang menguatkan peran pendidikan sebagai jembatan masa depan generasi penerus. Pada sektor kesehatan, prinsip keguyuban diwujudkan melalui upaya kolektif untuk menjaga derajat kesehatan masyarakat, baik melalui pelayanan yang semakin merata dan mudah diakses, peningkatan fasilitas dan tenaga medis, hingga peran aktif warga dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat.

Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen membangun masyarakat yang guyub, rukun, dan saling peduli sebagai fondasi ketahanan sosial budaya. Melalui program Komunitas yang Guyub dan Terhubung, untuk memperkuat nilai kegotongroyongan dengan mendorong kolaborasi aktif di bidang sosial, lingkungan, ekonomi kreatif, dan keagamaan. Pemuda sebagai generasi penerus diberdayakan lewat KASIH (Kepemudaan Aktif Seiring Integrasi Harmonis), yang meliputi pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta penguatan organisasi kepemudaan untuk menciptakan pemuda inovatif dan berdaya saing. Di bidang pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin akses yang merata dan berkualitas melalui program SIPASTI (Sistem Penanganan Stunting Terintegrasi) dan peningkatan fasilitas pendidikan, didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan literasi dan hidup sehat. Keamanan dan kenyamanan warga menjadi prioritas, sementara pelestarian budaya dan seni tradisional terus digiatkan untuk menjaga identitas lokal yang dinamis. Untuk mewujudkan kesejahteraan inklusif, mengurangi kemiskinan, dan membangun

Pasuruan yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Indah kotanya mencerminkan keindahan sebuah kota tidak hanya terletak pada lanskap fisiknya, tetapi bagaimana kota itu mewujudkan ruang hidup yang inklusif, adil, terhubung, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya. Kota Pasuruan tumbuh dengan semangat inklusivitas dan keadilan, dimana setiap lapisan masyarakat memiliki ruang yang setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan menikmati manfaat pembangunan tanpa diskriminasi. Keindahan kota juga diwujudkan melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua kelompok masyarakat. Akses terhadap perumahan berkualitas menjadi hak dasar yang dijamin, agar setiap keluarga dapat tinggal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, tertata, dan mendukung kualitas hidup. Dengan desain yang terintegrasi, semangat kebersamaan, dan komitmen terhadap keberlanjutan, kota tumbuh sebagai ruang hidup yang tidak hanya indah dipandang mata, tetapi juga adil dirasakan oleh seluruh warganya.

Kota Pasuruan berkomitmen mewujudkan keindahan yang holistik melalui pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan ramah lingkungan. Melalui REKAP (Revitalisasi Ekspansi Kawasan Aman dan Peduli Lingkungan), kawasan permukiman direvitalisasi menjadi hunian berkualitas yang terjangkau sekaligus ramah lingkungan, didukung oleh infrastruktur inklusif dalam program KERASAN (Kota dengan Infrastruktur Inklusif yang Nyaman). Konsep transit-oriented development diterapkan untuk menciptakan kawasan terpadu yang mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sekaligus memperkuat keterhubungan antar wilayah, serta menciptakan Lingkungan yang Sehat dan Lestari dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, mengoptimalkan pengelolaan sampah, dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga ekosistem kota.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029, perlu memperhatikan faktor- faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi proses pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan guna memperjelas langkah-

langkah strategis dalam mewujudkan visi tersebut. Hasil rumusan Misi RPJPD, Misi Calon Kepala daerah dan Misi rancangan teknokratik, maka misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pasuruan Tahun 2025-2029 sebanyak 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Responsif dan Merata Berbasis Digital.

Misi 1 menggambarkan salah satu cita-cita Kota Pasuruan ialah dapat menjawab seluruh tuntutan layanan masyarakat. Hal tersebut tentunya dapat dicapai dengan reformasi birokrasi sehingga birokrasi yang saat ini bertransformasi menjadi birokrasi yang agile, adaptif dan responsive;

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Kecamatan Bugul Kidul sebagai perangkat daerah yang membawahi beberapa sub unit yaitu kelurahan merupakan koordinator dari segala program kegiatan yang ada di kelurahan yang juga berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan PemerintahKota Pasuruan yang menjadi fungsi/bidang kewenangannya. Tujuan Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Kecamatan Bugul Kidul adalah pada misi I sehingga Kecamatan Bugul Kidul memiliki 1 tujuan sebagaimana berikut:

TUJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
INDIKATOR
Indeks Pelayanan Publik (IPP)

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan yang selaras dengan fungsi/bidang kewenangan Kecamatan Bugul Kidul pada misi IV yaitu:

SASARAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
INDIKATOR
Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut di atas maka akan kami tampilkan tabel terperinci terkait tujuan sasaran beserta indikator dan target kinerja Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2021-2026, sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	-	-	-	-	-
			Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	-	-	-	-	-
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	-	-	-	-	-
		Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	-	-	-	-	-

			Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	-	-	-	-	-
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62
		Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	93,5	94	94,5	95	96

Sumber : Renstra Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Periode 2021 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama (dijelaskan dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi rumus hitung) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
TAHUN 2025

NO.		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINIISI OPERASIONAL	METODE/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Tujuan: Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Perhitungan nilai ndeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Sesuai Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017	89	Sekretaris Camat	Camat
		Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	1 Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	Perhitungan jumlah kelurahan yang telah memiliki dan melaksanakan aplikasi layanan yang terintegrasi	Jumlah kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi / Jumlah kelurahan x 100	100,00%	Seksie Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Camat
			2 Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	Perhitungan pengaduan trantibmas yang dilaporkan kepada kecamatan dengan tindak lanjut atas laporan tersebut	Jumlah laporan trantib yang ditindaklanjuti / Jumlah total laporan dalam (Tahun- n) x 100	100,00%	Seksie Ketentraman dan Ketertiban Umum	Camat
2		Tujuan: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Persentase kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Perhitungan jumlah kelurahan dengan kategori cepat berkembang di wi layah Kecamatan Bugul Kidul	Jumlah kelurahan cepat berkembang / Jumlah kelurahan x 100 (Dari Aplikasi EPDESKEL)	87,00%	Seksie Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Camat
		Sasaran: Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	Perhitungan jumlah kelembagaan yang aktif dalam berkegiatan lembaganya	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif / Jumlah lembaga masyarakat x 100	100,00%	Seksie Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Camat
			2 Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	Perhitungan jumlah usulan masyarakat yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD / Jumlah usulan yang masuk x 100	87,00%	Seksie Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana	Camat

Pasuruan, 2 Januari 2025

CAMAT BUGUL KIDUL

ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP.19851029 200412 1 001

Tabel 2.2

Indeks Kinerja Utama Perubahan

Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025

INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINIISI OPERASIONAL	METODE/ FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat	Data hasil pengukuran diperoleh melalui kegiatan PEKPPP dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner, sesuai dengan Pedoman MENPANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme serta Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan	4,55	4,57	4,59	4,61	4,62	Laporan PEKPP Mandiri	Camat
Sasaran: Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Perhitungan nilai ndeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei kepuasan yang dilaksanakan melalui aplikasi E-Sukma Jatim dengan menggunakan skala penilaian tertentu. Pelaksanaan survei ini berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengukuran IKM tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kerja.	93,50	94,00	94,50	95	95,5	Laporan E-Sukma Jatim	Camat

Pasuruan, 7 Januari 2026

CAMAT BUGUL KIDUL

ALYASA AKBAR, S.STP

Pembina

NIP.19851029 200412 1 001

Pada Metode Formulasi Perhitungan terdapat satu sasaran strategis yang memiliki Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Sumber Data yang digunakan adalah Sumber Data dari Camat. Data didapatkan dari realita lapangan yang dirumuskan dengan satu metode formulasi perhitungan, diantaranya:

1. Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat dapat dihitung dengan Membandingkan antara Jumlah jenis layanan yang diberikan dengan total layanan pada SK Layanan dikali 100%. Sumber Data didapatkan dari Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
2. Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan memiliki formulasi perhitungan Membandingkan antara Jumlah Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan yang ditangani dengan jumlah total pengaduan tratibmas dan kebencanaan yang masuk ke Kecamatan dan Kelurahan dikali 100%. Sumber Data didapatkan dari Seksi Keamanan danKetertiban Umum;
3. Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina dapat dihitung dengan Membandingkan antara Kelembagaan masyarakat yang di bina yang anggarannnya masuk dalam Daftar Perencanaan Anggaran di kecamatan dengan jumlah total Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dikali 100%. Sumber data didapatkan dari Kasie Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat;
4. Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot dihitung dengan Jumlah usulan musrembangcam yang diakomodir dalam musrembangkot dibagi dengan jumlah usulan musrembangcam dikali 100%. Sumber data didapatkan dari Kasie Pemberdayaan dan Sarana Prasarana;

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang tertuang pada Renstra Kecamatan Bugul Kidul memiliki penjelasan bahwa Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan di Kecamatan Bugul Kidul adalah 93,5 terealisasi sebesar 94. Perhitungan didapatkan dari Aplikasi E-SUKMA yang terintegarsi dengan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,55
		Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	93,5

Rencana Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dapat dijelaskan sasaran strategis dan indikator berdasarkan Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan oleh Camat Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja

Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Tahun 2025

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase Kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100%
	Persentase kegiatan dan laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%
Meningkatnya Keberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan masyarakat yang aktif	100%
	Persentase usulan musrenbangcam yang disepakati dalam forum PD	87%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
		Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.897.083.820
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.663.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	152.654.900
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	226.430.400
5	Program Peneyelengaaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.428.300
JUMLAH		**9.349.260.420**

Dapat dijelaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan DPA Perangkat Daerah Awal tahun 2025 yang dituangkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Kecamatan Bugul Kota Pasuruan

Tahun 2025

7 .01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (%)**	**%**	**100**	**8.897.083.820**
7 .01.01.2 .01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu**	**%**	**100**	**53.500.000**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	9.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	3.500.000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	41.000.000
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**%**	**100**	**7.772.425.619**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	7.578.083.719
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.000.000

7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	190.341.900
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**%**	**100**	**20.238.500**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	20.238.500
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya**	**%**	**100**	**1.645.000**
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1.645.000
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**124.254.400**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	12.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	10.000.000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundanga-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	365	4.814.400
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	4.500.000

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	92.940.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya pengadaan bmd**	**%**	**100**	**104.876.000**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Paket	15	39.966.000
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	8	64.910.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**%**	**100**	**1.242.885.130**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan)**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**%**	**100**	**756.527.650**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	94.999.600
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	660.728.050
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bakalan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**67.948.580**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	67.948.580

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Krampyangan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**83.801.800**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	83.801.800
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Blandongan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**82.362.100**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	82.362.100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kepel)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**102.178.100**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	102.178.100
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bugul Kidul)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**79.364.000**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	79.364.000
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tapaan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**70.702.900**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	70.702.900

7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**%**	**100**	**84.610.300**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	70.380.600
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	60	14.229.700
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.727.100
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**	**%**	**85**	32.663.000
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**	**Usulan**	**54**	32.663.000
7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	32.663.000
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**%**	**100**	**1.503.295.880**
7.01.03.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**Lembaga**	**7**	152.654.900

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	7	152.654.900
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bakalan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**208.601.300**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	8.601.800
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Unit	10	20.579.400
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	179.420.100
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Krampyangan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**208.891.600**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	8.891.600
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Unit	10	13.184.400
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	186.815.600
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Blandongan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**211.429.100**

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	11.429.100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Unit	10	16.845.300
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	183.154.700
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kepel)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**210.519.100**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	10.520.400
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Unit	60	30.528.700
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	169.470.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bugul Kidul)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**210.204.100**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	10.204.100
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Dokumen	1	20.000.000

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	180.000.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tapaan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**%**	**100**	**215.470.280**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	8	15.470.500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Dokumen	10	11.641.700
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	188.358.080
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**%**	**100**	**432.559.100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**Pengaduan**	**30**	226.430.400
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	226.430.400
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Bakalan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**18.420.000**

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	18.420.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Krampyangan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**18.793.900**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	18.793.900
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Blandongan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**30.115.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30.115.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Kepel)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**25.194.500**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	25.194.500
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Bugul Kidul)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**19.952.300**

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	19.952.300
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Tapaan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**%**	**100**	**22.856.600**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	22.856.600
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**Kelurahan**	**6**	**740.015.700**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	40.428.300
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	40.428.300
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bakalan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**126.671.900**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	126.671.900

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Krampyangan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**70.660.600**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	70.660.600
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Blandongan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**114.680.200**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	114.680.200
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kepel)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**107.016.800**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Kepel	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	107.016.800
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bugul Kidul)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**162.416.000**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	162.416.000

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Tapaan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Kegiatan**	**8**	**77.951.900**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	12	77.951.900

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Pada tanggal 3 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan terjadi Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bugul Kidul

Tahun 2025

Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan kecamatan	-	93,5%

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.944.343.820	8.987.568.751
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	32.663.000	24.796.800
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	152.654.900	122.157.900
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	226.430.400	163.253.750
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	40.428.300	55.715.400
JUMLAH		9.396.520.420	9.353.492.601

Dengan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kecamatan Bugul Kidul

Tahun 2025

7.01	**KECAMATAN**			**%**	**100**	**11.788.309.053**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (%)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi (%)**	**%**	**100**	**9.282.680.103**
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**Nilai**	**77**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu**	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu**	**%**	**100**	**17.278.400**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4.547.500

7.01.01.2.01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	1.644.500
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	11.086.400
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu**	**%**	**100**	**8.094.393.803**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	51	7.953.989.003
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1.886.100

7.01.01.2.02.07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	138.518.700
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu (%)**	**%**	**100**	**11.625.200**
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	2	11.625.200
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**33.829.200**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	2.247.200
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	4.248.000

7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Jumlah Bahan / Material yang disediakan	Paket	2	6.000.000
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2.240.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	19.094.000
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpenuhinya pengadaan bmd**	**Presentase Terpenuhinya pengadaan bmd**	**%**	**100**	**55.451.200**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	UNIT	4	55.451.200
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Layanan Perkantoran**	**%**	**100**	**963.167.700**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan)**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**Persentase terpenuhinya jasa Penunjang layanan perkantoran**	**%**	**100**	**668.056.348**

7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	250.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	83.967.948
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	583.838.400
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bakalan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**43.739.700**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	43.739.700
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Krampyangan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**51.116.400**

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	51.116.400
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Blandongan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**54.088.200**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	54.088.200
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kepel)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**50.994.252**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	50.994.252
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bugul Kidul)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**45.088.700**

7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	45.088.700
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Tapaan)**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Yang Terfasilitasi**	**%**	**100**	**50.084.100**
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	50.084.100
7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Derah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara**	**%**	**100**	**106.934.600**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	51.628.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan Dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	39	8.046.600

7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	47.260.000
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Usulan Musrenbangcam Yang Diakomodir Dalam Musrenbangkot**	**Persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot**	**%**	**87**	**24.796.800**
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Usulan dalam Musrebangcam**	**Jumlah kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kegiatan**	**2**	**24.796.800**
7.01.02.2.01.01	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	24.796.800

07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat yang di Bina**	**Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina**	**%**	**100**	**1.523.349.500**
7.01.03.2.01.	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang dibina**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kegiatan**	**15**	**122.157.900**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	122.157.900
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bakalan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**231.050.000**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	9.300.000

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	221.750.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Krampyangan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**232.416.600**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	10.666.600
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Unit	84	13.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	208.750.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Blandongan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**233.375.000**

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	11.625.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	221.750.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kepel)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**234.750.000**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	13.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	221.750.000
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**232.850.000**

	n (Bugul Kidul)					
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	11.100.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun	unit	10	9.459.600
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	212.290.400
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tapaan)**	**Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Aktif**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kegiatan**	**15**	**236.750.000**
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	7	15.000.000

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Pokmas / Ormas	7	221.750.000
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**Persentase Penanganan Pengaduan Trantibmas dan Kebencanaan**	**%**	**100**	**289.552.550**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Jumlah Kejadian Bencana dan Pengaduan Trantibmas Yang Ditangani Secara Tepat Waktu**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**163.253.750**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	163.253.750

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Bakalan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**18.420.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	18.420.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Krampyangan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**18.370.000**

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	18.370.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Blandongan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**28.110.000**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	28.110.000

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Kepel)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**21.741.300**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	21.741.300
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Bugul Kidul)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**19.145.000**

7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	19.145.000
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (Tapaan)**	**Persentase Kegiatan Dan Laporan Trantibmas Yang Ditindak Lanjuti Sesuai Standar**	**Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan**	**Kegiatan**	**4**	**20.512.500**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.512.500
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Kelurahan Yang Telah Menyelenggarakan Pelayanan Terintegrasi**	**Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat**	**Persen**	**100**	**667.930.100**

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**55.715.400**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	55.715.400
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bakalan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**128.539.600**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	128.539.600

	Instansi Vertikal					
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Krampyangan)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**60.555.700**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	60.555.700
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**108.088.700**

	(Blandongan)					
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Blandongan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	108.088.700
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kepel)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**90.298.800**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	90.298.800

	Instansi Vertikal Kelurahan Kepel					
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Bugul Kidul)**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**153.931.700**
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Bugul Kidul	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	153.931.700
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugas**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kegiatan**	**4**	**70.800.200**

	an Kepala Daerah (Tapaan)					
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Kelurahan Tapa'an	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Dokumen	4	70.800.200

2.4 INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di Kecamatan Bugul Kidul adalah:

- Adanya Koordinasi dan berbagi informasi baik dari pihak internal dan eksternal sehingga Kecamatan Bugul Kidul dapat terus mengikuti perubahan berbagai aturan yang dinamis khususunya pada anggaran tahun 2025.
- Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung, yakni Adanya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional Kecamatan Bugul Kidul. Tugas dan Fungsi yang mantap dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.
- Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik, yakni Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, yakni Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan dilakukan

untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengkatagorian Capaian Kinerja

No	Katagori/Interpretasi	Rata-rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Katagori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	93,5%	94.25%	100%	Sangat Tinggi	Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Pada tabel 3.2 diatas, menyajikan data capaian realisasi indikator kinerja utama pada 1 (satu)sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator, sebagaimana berikut:

Sasaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat (satu) indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan ditargetkan sebesar 93,50%, dan terealisasi sebesar 94,25%.

Untuk mewujudkan capaian tersebut, terdapat dukungan dari program dan kegiatan yaitu:

Program	Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	Persentase kelurahan yang telah menyelenggarakan pelayanan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standart	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya keberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Usulan Musrenbangcam yang Disampaikan dalam Forum PD	85%	86%	87%	100%	100%
3	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	93,5%	94,25	100

Uraian penjelasan tabel:

1. Sasaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat memiliki realisasi pada Tahun 2023 adalah 89%, tahun 2024 sudah bisa direalisasikan 90,5%.

Pada tahun 2025 ditargetkan 93,5% dan ternyata sudah bisa direalisasikan sebesar 94,25%. Sehingga apa yang ditargetkan bisa tercapai seluruhnya 100%

1.1.4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Kemajuan Capaian Sasaran strategis

NO	Tujuan/Sasara 2025	Indikator KinerjaTahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 4/5*100
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	94,25%	93,5%	100%

Sumber : Renstra 2021-2026 Kecamatan Bugul Tahun 2025

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/provinsi

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bugul Kidul pada Tahun 2025 mencapai sebesar 94,25 persen. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, nilai tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik (A), yaitu berada pada rentang nilai 88,31–100,00. Dengan demikian, capaian IKM Kecamatan Bugul Kidul tidak hanya telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, tetapi juga memenuhi dan melampaui standar nasional kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	94,25%	91,25% (Provinsi Jawa Timur)	

Sumber : PermenPANRB No 14 Tahun 2017

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dijelaskan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bugul Kidul pada tahun n mencapai 94,25%. Capaian tersebut telah melampaui indeks Kepuasan masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam aplikasi E-SUKMA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 91,25%.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.6

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	93,5%	94,25%	100%	**Keberhasilan:** 1. SDM yang kompeten 2. Perbaikan lobi dengan konsep pshycal evidence, adanya ruangan indoor dan outdoor.	-

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kota Pasuruan

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	93,5%	94,25%	100%	11.788.309.053	10.432.063.901	88 %

Sumber : Anggaran Perubahan Kecamatan Bugul Kidul Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.7, sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Bugul Kidul pada tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai realisasi sebesar 94,25% dari target 93,5%, serta indikator persentase laporan trantibmas yang ditindaklanjuti sesuai standar mencapai 100%, yang menunjukkan terpenuhinya target kinerja. Dari sisi anggaran, realisasi belanja mencapai 88% hingga 99% dari anggaran yang dialokasikan, sehingga mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang	Analisis
1	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Meningkat	a. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	a. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	Menunjang	SDM aparatur telah memadai dalam penyelenggaraan pelayanan
				b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	Menunjang	Dilakukan komunikasi yang baikdengan masyarakat sehingga bisa sinergi antara aparatur dangan masyarakat
				c. program penyelenggaraan		100	Menunjang	Dilakukan sinergitas dalam pelaksanaan musrenbangcam

				pemerintahan dan pelayanan publik d. program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		100	Menunjang	Dilakukan pembinaan pada kelembagaan di kecamatan dan kelurahan.

Sumber : Renstra 2021 – 2026 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan di Kecamatan Bugul Kidul adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tahun 2025 diukur melalui indikator persentase usulan musrenbangcam yang diakomodir dalam musrenbangkot. Target yang ditetapkan sebesar 87 persen dan realisasi capaian mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh usulan masyarakat yang diajukan melalui musrenbang tingkat kecamatan berhasil diakomodir dalam musrenbang tingkat kota. Keberhasilan program ini mencerminkan efektivitas proses perencanaan partisipatif serta kuatnya koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan perangkat daerah terkait.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan

indikator persentase kelembagaan masyarakat yang dibina. Pada tahun 2025, target dan realisasi capaian sama-sama mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh kelembagaan masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan telah difasilitasi secara optimal. Keberhasilan program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang berjalan sesuai rencana, serta kemampuan perangkat kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara efektif.

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur melalui indikator persentase penanganan pengaduan trantibmas dan kebencanaan. Pada tahun 2025, target capaian sebesar 100 persen dan realisasi juga mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat dapat ditangani secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Keberhasilan program ini didukung oleh sinergi yang baik antara kecamatan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya, serta kesiapsiagaan aparatur dalam menghadapi potensi gangguan ketenteraman dan kebencanaan.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2025 diukur melalui indikator persentase penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Target dan realisasi capaian ditetapkan sebesar 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh layanan pemerintahan umum telah diselenggarakan sesuai ketentuan. Keberhasilan program ini didukung oleh terlaksananya seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, serta optimalnya pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**667.930.100**	**664.416.820**	99%
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**289.552.550**	**286.725.349**	99%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**1.523.349.500**	**1.447.937.756**	95%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**24.796.800**	**24.796.800**	100%

Uraian pada table diatas adalah sebagai berikut:

3.2.1 Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 667.930.100,- dan terealisasi sejumlah Rp. 664.416.820,- Sehingga persentase Capaian Anggarannya adalah 99%.

3.2.2 Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 289.552.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.552.550,- Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 99%.

3.2.3 Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan anggaran pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.523.349.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.523.349.500,-. Sehingga Persentase capaian anggarannya adalah 95%.

3.2.4 Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran pada Tahun 2025 adalah Rp. 24.796.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 24.796.800. Sehingga persentase capaian anggarannya adalah 100%.

3.3 Inovasi

1. Inovasi Pada Aspek Pelayanan (Non digital)

   A. NYAMUK MAS (Nyaman untuk Masyarakat)

   Pelayanan "NYAMUK MAS" (Nyaman Untuk Masyarakat) bertujuan untuk memberikan rasa kenyamanan kepada masyarakat ketika menunggu antrian pelayanan. Ruang pelayanan di desain senyaman mungkin untuk masyarakat yang meminta pelayanan di Kantor Kecamatan Bugul Kidul dengan ruang pelayanan yang cukup luas, dilengkapi dengan sarana hiburan dan komunikasi serta tempat duduk antrian yang nyaman serasa di rumah sendiri.

   B. SUKAWARIS (Surat Keterangan Ahli Waris Tuntas dalam Sehari)

   Surat Keterangan Waris merupakan dokumen penting yang sering diperlukan dalam berbagai urusan administratif, terutama saat mengurus harta warisan. Di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, proses pembuatan surat keterangan waris diinovasikan dengan prosesnya dapat dilakukan dengan relatif cepat, yakni dalam satu hari kerja. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan ke kantor kecamatan setempat dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti akta kematian, KTP, dan KK ahli waris.

2. Inovasi pada Aspek Pelayanan (Digital)

   A. Distrik Digital

   Aplikasi Database terpusat untuk menghubungkan data kelurahan agar menghasilkan informasi kependudukan yang akurat dan terhubung (sinkron) sehingga meningkatkan pengawasan pemerintahan.

2.4 Penghargaan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Bugul Kidul banyak mengukir prestasi. Prestasi-prestasi yang diraih Kecamatan Bugul Kidul diantaranya adalah sebagai berikut:

NO	PRESTASI	PELAKSANA
1.	Juara 1 Pemuda Tani Kategori Bisnis	Pemerintah Kota Pasuruan
2.	Lomba Lomba 10 Program Pokok PKK	Pemerintah Kota Pasuruan
3.	Lomba Aku Hatinya PKK	Pemerintah Kota Pasuruan

4.	Juara 1 Lomba Cerdas Cermat PKK	Pemerintah Kota Pasuruan
5.	Juara Kelurahan Berseri "Kelurahan Bakalan"	Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

4.1 Kesimpulan

LKjIP Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Tahun 2025 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis/Program dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari tabel-tabel diatas bisa dilihat bahwa dari 4 Indikator sasaran yang dimiliki oleh Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan masuk kategori “Sangat Tinggi”. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025 Kecamatan Kidul Kota Pasuruan berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkanya Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan telah melebihi target, yaitu sebesar 100% dan capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkannya Pelayanan Masyarakat telah melebihi target, yaitu sebesar 100%.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di tahun-tahun mendatang. Pertama, meskipun capaian indikator kinerja telah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan

bahkan melebihi target, penting bagi kecamatan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan, serta mengidentifikasi area yang masih dapat dikembangkan, seperti inovasi pelayanan publik atau peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Kedua, agar keberlanjutan kinerja tetap terjaga, Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan perlu menyusun strategi jangka panjang yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Meskipun target telah tercapai, penting untuk menetapkan standar yang lebih tinggi atau menambah indikator kinerja yang lebih spesifik guna mendorong peningkatan yang lebih signifikan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program harus terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih besar serta terlibat aktif dalam pembangunan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kidul Kota Kota Pasuruan yang menggambarkan capaian Kinerja tiap-tiap sasaran dan program pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pasuruan.

Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja-sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasuruan, 28 Februari 2025

CAMAT BUGUL KIDUL



ALYASA AKBAR, S.STP
Pembina
NIP.19851029 200412 1 001

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan 2025